

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*).

Teori Agensi (*Agency Theory*) dikemukakan oleh Micael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) dalam Masdupi (2005,59) mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan *principal* (pemilik usaha). Di dalam hubungan agensi terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Eisenhard (dalam arifin 2005), membagi teori agensi menjadi 3 (tiga) buah asumsi yaitu : asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian dan asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*) (Arifin, 2005). Asumsi keorganisasian menjelaskan konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Informaton* (AI) Antara pemilik perusahaan dan manajemen. Asumsi tentang informasi adalah konsep yang menjelaskan bahwa informasi merupakan sebuah komoditi.

Informasi yang tidak seimbang dapat menyebabkan masalah bagi *principal* dalam mengontrol dan memonitor kinerja agen. Asimetri yang terjadi Antara *principal* dengan agen akan membuka peluang bagi pihak agen untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Bukhori (2012) menjelaskan bahwa semakin tinggi asimetri informasi antara manajer dengan pemilik yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh manajemen akan memicu semakin tingginya biaya keagenan (*agency cost*).

Posisi tawar Antara principal dengan agen membuat pengambilan keputusan pada perusahaan seringkali menghasilkan keputusan pada perusahaan seringkali menghasilkan keputusan yang bertolak belakang. Prinsipal sebagai pemilik perusahaan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan perusahaan sedangkan agen selaku pelaksana operasional perusahaan menguasai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan.

Adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar belakang principal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang namun saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling Tarik menarik kepentingan dan pengaruh Antara satu sama lain (Arifin, 2005)

Agen berperan sebagai penyedia informasi bagi principal dalam pengambilan keputusan. Agen dapat melakukan upaya sistematis yang dapat menghambat principal dalam pengambilan keputusan strategis melalui penyediaan informasi yang tidak transparan. Sedangkan principal selaku pemilik modal bertindak semaunya ataupun sewenang-wenang karena ia merasa sebagai pihak yang paling berkuasa dan penentu keputusan dengan wewenang yang tak terbatas. Perbedaan cara berpikir antara principal dengan agen yang terjadi menyebabkan pertentangan cara berpikir antara principal dengan agen yang semakin tajam sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan yang pada akhirnya merugikan semua pihak (Arifin, 2005).

Menurut Arifin (2005) dalam konsep *Agency Theory*, manajemen agen semestinya *on behalf of the best interest of the shareholder*, aka tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen yang melakukan aktivitas operasi yang tidak menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi dapat mengganggu aktivitas perusahaan dan profitabilitas perusahaan secara

keseluruhan. Perbedaan kepentingan antara principal dan agen inilah disebut dengan *Agency problem* yang salah satunya disebabkan oleh adanya *Asymmetric Information* (Ariifin, 2005).

2.1.2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu perusahaan (Nugroho, 2014).

Pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka :

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat

mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Terdapat lima asas good corporate, yaitu;

1. Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain

5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Wahyu Widarjo,

2010: 25). Menurut Marselina Widiastuti, Pranata P. Midiastuty, dan Eddy Suranta,(2013: 3407), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham. Hal tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer (Vera Kusumawati, 2011: 38-39).

2.1.4. Dewan Komisaris Independen

KNKG (2006) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara olektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.

Dewan komisaris Independen merupakan pihak yang tidak diperkenankan memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan.pembentukan dewan komisaris independen diharapkan akan melindungi pemegang saham.Setidaknya jumlah komisaris independen dalam perusahaan adalah 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen diukur dari presentase jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan dari seluruh jumlah dewan komisaris (Ujiyanto dan Pramuka,2007:10).

2.1.5. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan sebagai pelaksana opeasi dan keperguruan perusahaan.Pengangkatan dan

pemecatan dewan direksi, penentuan besar penghasilannya, serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengelolaan perusahaan bergantung pada kinerja dan kebijakan dari dewan direksi. Tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota direksi adalah saling berkaitan dan mengikat serta merupakan tanggung jawab sesama anggota direksi pada perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 menyebutkan paling kurang terdapat dua orang anggota direksi dalam perusahaan. Besar kecilnya perusahaan menentukan jumlah minimal anggota dewan direksi. Dewan direksi diukur dari jumlah anggota direksi dalam perusahaan (Hisamuddin dan Tirta, 2012:125).

2.1.6. Komite Audit

Konsep Komite Audit pertama kali diperkenalkan oleh New York Stock Exchange (NYSE) pada tahun 1939 (Fulop 2013). Pada awal tahun 1970-an Komisi Sekuritas di Amerika Serikat merekomendasikan perusahaan yang listing di bursa efek menyusun komite audit yang terdiri dari non-executive directors dan pada tahun 1979 NYSE menentukan persyaratan bahwa semua anggota komite audit haruslah dari kalangan independen (Fulop, 2013).

Dalam keputusan Bapepam nomor Kep-29/PM2004 disebutkan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu komisaris independen yang bertindak sebagai ketua komite audit dan sekurang-kurangnya dua anggota lain yang berasal dari luar emiten atau perusahaan public (Nugroho, 2014). Menurut Vafeas (dalam Nugroho, 2014) menyatakan bahwa rata-rata jumlah komite audit yang ideal adalah 3-4 orang.

2.1.7. Profitabilitas

Salah satu indikator penting bagi investor dalam menilai prospek perusahaan di masa depan adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan (Tandelilin, 2007). Profitabilitas menurut Saidi (2004) dalam Martalina (2011) adalah kemampuan perusahaan dalam

memperoleh laba. Menurut Sartono (2001: 122), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Para investor tetap tertarik terhadap profitabilitas perusahaan karena profitabilitas merupakan satu-satunya indikator yang paling baik mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Bagi perusahaan pada umumnya, masalah profitabilitas merupakan hal yang penting disamping masalah laba, karena laba yang besar belum merupakan suatu ukuran bahwa suatu perusahaan telah bekerja secara efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal atau kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain ialah menghitung profitabilitas.

Salah satu rasio untuk menghitung profitabilitas adalah *return on asset* (ROA). *Return on asset* adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Sutrisno (2012:223), rumus ROA adalah :

$$ROA = \frac{\text{laba bersih sesudah pajak}}{\text{total aktiva}}$$

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh mekanisme Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas. Diantarannya penelitian yang dilakukan Helfina Rimardhani (2016) yang melakukan pengujian pengaruh mekanisme Good Corporate Governance (GCG) terhadap profitabilitas perusahaan. Mekanisme GCG diprosikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Profitabilitas perusahaan diukur dengan Return On Asset (ROA). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh signifikan

terhadap ROA. Secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan proksi mekanisme GCG yang lain, yaitu dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan Nur Hisamuddin dan M. Yayang Tirta K (2011) yang melakukan pengujian terhadap bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE. Ini menunjukkan bahwa penerapan GCG oleh BI pada bank umum dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi dan menumbuhkan kinerja perbankan syariah khususnya dengan harapan dapat menarik investor untuk meningkatkan investasinya.

Penelitian yang dilakukan Tria Syafitri, Nila Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlaily (2018) yang melakukan pengujian terhadap pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Pengaruh yang diuji tersebut antara lain yaitu, pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Nilai Perusahaan. Variabel GCG yaitu Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, Nilai perusahaan diproksikan dengan Tobin's Q. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda Uji F dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 diketahui bahwa variabel Komite Audit (X1), Kepemilikan Manajerial (X2), Dewan Direksi (X3), dan Dewan Komisaris (X4) berpengaruh secara serentak atau bersama-sama terhadap Tobin's Q, hal ini ditunjukkan dengan hasil uji F variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tobin's Q dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Penelitian yang dilakukan Tangguh wicaksono (2014) yang melakukan pengujian terhadap apakah GCG (Good Corporate Governance) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. GCG dalam hal ini di proksikan dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan

komisaris dan dan komite audit. Sedangkan variabel profitabilitas diproksikan dengan ROE (Return On Equity). Hasil penelitian diketahui bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE dan variabel komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE serta dewan komisaris berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian menunjukkan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Penelitian yang dilakukan David Tjondro dan R. Wilopo (2011) yang melakukan pengujian terhadap Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia . Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah Corporate Governance, profitabilitas yang diukur dari ROA, ROE dan NIM, dan kinerja saham yang diukur dari return saham dan PER. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa GCG memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap indikator-indikator profitabilitas dalam perusahaan-perusahaan sektor perbankan seperti ROA, ROE dan NIM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik GCG maka akan semakin meningkat tingkat profitabilitas

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SAMPEL	METODE PENELITIAN	HASIL
1.	Nur Hisamuddin dan M. Yayang Tirta K (2011)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	Menguji Bagaimana Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	Variabel Independen : Good Corporate Governance Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan (annual report) dan laporan GCG selama periode 2008 sampai dengan 2010.	Analisis Statistik Deskriptif dan menggunakan PLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA dan ROE. Ini menunjukkan bahwa penerapan GCG oleh BI pada bank umum dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi dan menumbuhkan kinerja perbankan syariah khususnya dengan harapan dapat menarik investor untuk meningkatkan investasinya
2.	Tria Syafitri, Nila Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlaily (2018)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Industri Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2016)	Menganalisis dan menguji pengaruh antara Good Corporate Governance (GCG) terhadap Nilai Perusahaan	Variabel GCG yaitu Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, Nilai perusahaan diprosikan dengan Tobin's Q.	Sampel yang diambil sebanyak 45 yaitu, 9 perusahaan dikali dengan periode 5 tahun	Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji f dan uji t.	Hasil Analisis Regresi Berganda Uji F Dengan Tingkat Signifikan Sebesar 0,05 Diketahui Bahwa Variabel Komite Audit (X1), Kepemilikan Manajerial (X2), Dewan Direksi (X3), Dan Dewan Komisaris (X4) Berpengaruh Secara Serentak Atau Bersama-

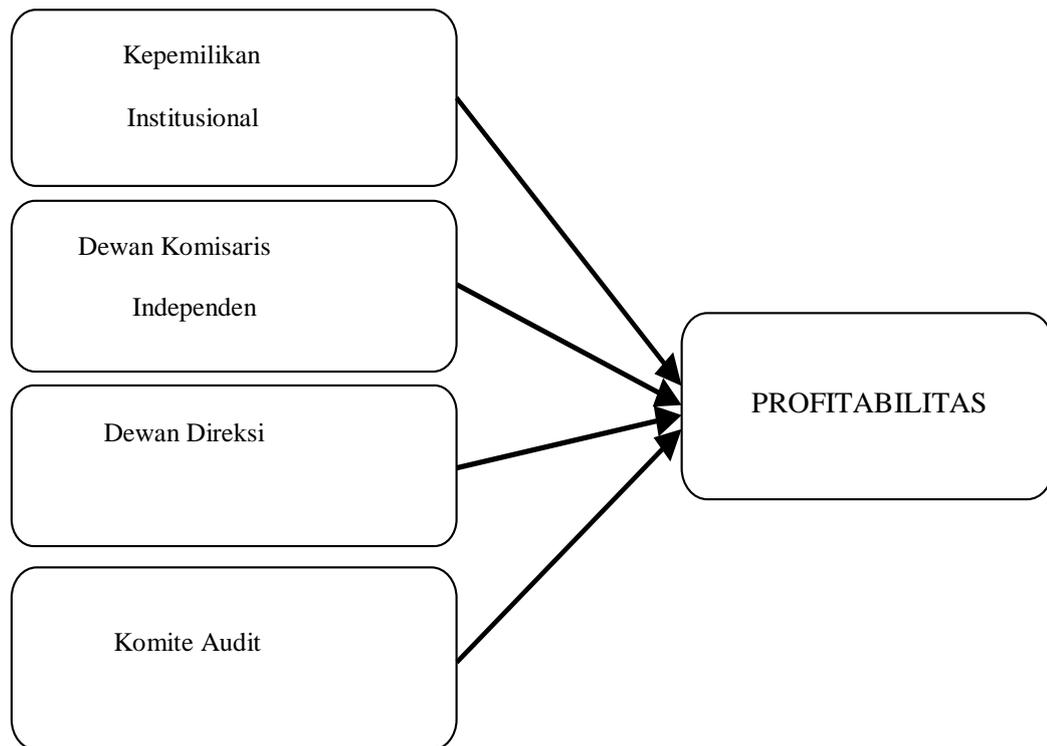
							Sama Terhadap Tobin's Q, Hal Ini Ditunjukkan Dengan Hasil Uji F Variabel Bebas Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Tobin's Q Dengan Nilai Signifikansi $0,000 < 0,05$.
3.	Helfina Rimardhani, R. Rustam Hidayat dan Dwiatmanto (2016)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014)	Menguji Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Perusahaan	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dan Komite Audit	Sampel Yaitu Dengan Metode Purposive Sampling. Berdasarkan Kriteria-Kriteria Yang Telah Ditentukan, Diperoleh 12 Perusahaan Yang Dijadikan Sampel Penelitian	Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan proksi mekanisme GCG yang lain, yaitu dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
4.	Tangguh Wicaksono (2014)	Pengaruh Good Corporate Governance	Mengetahui apakah GCG (Good Corporate	GCG dalam hal ini di proksikan dengan ukuran dewan direksi,	Sampel Yaitu Purposive Sampling. Sehingga Didapat Jumlah	Metode analisis yang digunakan adalah	Hasil penelitian diketahui bahwa variabel dewan direksi

		Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Peserta Corporate Governance Perception Index (CGPI) Tahun 2012)	Governance) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.	ukuran dewan komisaris dan dan komite audit. Sedangkan variabel profitabilitas diproksikan dengan ROE (Return On Equity).	Observasi Sebanyak 58 Perusahaan	metode regresi linear berganda atau OLS (Ordinary Least Square)	berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE dan variabel komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE serta dewan komisaris berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian menunjukkan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan
5.	David Tjondro Dan R. Wilopo (2011)	Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap profitabilitas dan kinerja saham.	Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah Corporate Governance, profitabilitas yang diukur dari ROA, ROE dan NIM, dan kinerja saham yang diukur dari return saham dan PER.	Sampel diambil dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Sekaran, 1992).	Pada penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi	GCG memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan. Hal ini berarti semakin baik penerapan GCG maka akan makin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dalam hal ini diukur dengan ROA, ROE dan NIM.

2.3. Model Konseptual

Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi ROA. Faktor-faktor tersebut antara lain : Kepemilikan Institusional, Dewan komisaris Independen, Dewan direksi, Komite Audit.

Gambar 2.1
Model Konseptual Penelitian



Keterangan;

—————> :Pengaruh interaksi masing-masing variabel independen Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit. Terhadap ROA.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Profitabilitas

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham. Berdasarkan hasil penelitian dari Rimardhani, Hidayat dan Dwiatmanto (2016) Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini dikarenakan tingginya prosentase kepemilikan institusional menyebabkan pengawasan dari pemegang saham institusi semakin ketat yang berdampak pada semakin tinggi tekanan institusi terhadap manajer untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Profitabilitas

2.4.2. Hubungan Dewan Komisaris Independen dengan Profitabilitas

Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Ujianto dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa Komisaris Independen diukur dari presentase jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan dari seluruh jumlah dewan. Berdasarkan hasil penelitian dari Rimardhani, Hidayat dan Dwiatmanto (2016) Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini dikarenakan karena kenaikan dewan komisaris independen akan berakibat pada penurunan ROA. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Profitabilitas

2.4.3. Hubungan Dewan Direksi dengan Profitabilitas

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan perusahaan. Pengangkatan dan pemecatan dewan direksi, penentuan besar penghasilannya, serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi dilakukan pada saat Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan hasil penelitian dari Rimardhani, Hidayat dan Dwiatmanto (2016) Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan jumlah dewan direksi dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ROA. Dewan direksi belum mampu melakukan koordinasi serta pengambilan keputusan yang tepat dalam menjalankan fungsi kontrol yang lebih baik untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H3: Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas

2.4.4. Hubungan Komite Audit dengan Profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian dari Rimardhani, Hidayat dan Dwiatmanto (2016) Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan jumlah komite audit tidak dapat menjamin keefektifan kinerja komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Diandono (2012) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H4: Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas